



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perubahannya, ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil yang diperuntukan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0111);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/barang.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBH PP adalah dana yang bersumber dari pajak daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
14. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
15. Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat PR adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian DBH PP kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis DBH PP kepada Kabupaten/Kota;
- b. alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota; 

- c. tata cara penyaluran DBH PP kepada Kabupaten/Kota;
- d. penganggaran dan penggunaan DBH PP kepada Kabupaten/Kota; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DBH PP KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

DBH PP kepada Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. DBH PP PKB;
- b. DBH PP BBNKB;
- c. DBH PP PBBKB;
- d. DBH PP PAP; dan
- e. DBH PP PR.

BAB III

ALOKASI DBH PP KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

- (1) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan presentase sebagai berikut :
 - a. PKB dan BBNKB dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
 - b. PBBKB dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
 - c. PR dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota; dan
 - d. PAP dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan aspek potensi antar Kabupaten/Kota dan pemerataan.
- (3) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek potensi antar Kabupaten/Kota dan pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. DBH PP PKB, DBH PP BBNKB dan DBH PP PBBKB sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota;
 - b. DBH PP PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota; dan
 - c. DBH PP PR berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota.
- (4) Alokasi DBH PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN DBH-PP
KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 7

- (1) DBH PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan kepada Kabupaten/Kota setiap triwulan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus triwulan IV hanya sampai bulan november, bulan desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara PD dan instansi terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penyaluran DBH PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. penyaluran triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan;
 - b. penyaluran triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I;
 - c. penyaluran triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I dan II; dan
 - d. penyaluran triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak sampai dengan bulan november dikurangi penyaluran triwulan I, II dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal realisasi penerimaan bulan desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD atau APBD perubahan, maka DBH PP disalurkan maksimal sebesar target sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN
DBH PP KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

- (1) Pendapatan DBH PP dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran PD terkait di Kabupaten/Kota. 

- (2) Dalam rangka pencapaian sasaran DBH PP kepada Kabupaten/Kota tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari PKB dialokasikan paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum.
- (4) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari PR dialokasikan paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (5) Penggunaan PR untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka mendukung pendanaan program jaminan kesehatan nasional, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan untuk program jaminan kesehatan masyarakat terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (7) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan PR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka sisa anggaran PR digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan PR untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5). *re*

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

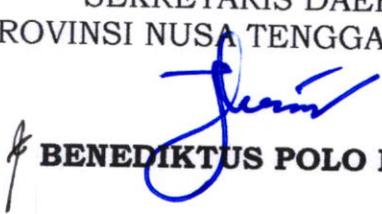
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 012

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 12 TAHUN 2021****TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021****A. ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021****1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**

| NO | KAB/KOTA | PKB |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. | KOTA KUPANG | 25.311.012.749 |
| 2. | KABUPATEN KUPANG | 8.203.562.007 |
| 3. | KABUPATEN SABU RAIJUA | 4.083.514.334 |
| 4. | KABUPATEN ROTE NDAO | 4.619.088.932 |
| 5. | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | 7.955.778.471 |
| 6. | KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | 6.734.333.418 |
| 7. | KABUPATEN BELU | 8.343.971.048 |
| 8. | KABUPATEN ALOR | 5.149.929.554 |
| 9. | KABUPATEN FLORES TIMUR | 5.554.223.988 |
| 10. | KABUPATEN LEMBATA | 4.974.009.212 |
| 11. | KABUPATEN SIKKA | 8.404.784.816 |
| 12. | KABUPATEN ENDE | 7.330.456.059 |
| 13. | KABUPATEN NGADA | 5.393.623.048 |
| 14. | KABUPATEN NAGEKEO | 4.896.549.589 |
| 15. | KABUPATEN MANGGARAI | 8.149.468.338 |
| 16. | KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | 5.328.598.165 |
| 17. | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | 6.254.563.676 |
| 18. | KABUPATEN SUMBA TIMUR | 7.165.171.914 |
| 19. | KABUPATEN SUMBA BARAT | 5.066.205.461 |
| 20. | KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA | 4.886.221.003 |
| 21. | KABUPATEN SUMBA TENGAH | 3.944.148.509 |
| 22. | KABUPATEN MALAKA | 5.266.631.111 |
| TOTAL | | 153.015.845.402 |

2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

| NO | KAB/KOTA | BBN - KB |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. | KOTA KUPANG | 14.320.163.187 |
| 2. | KABUPATEN KUPANG | 6.035.405.100 |
| 3. | KABUPATEN SABU RAIJUA | 3.549.625.324 |
| 4. | KABUPATEN ROTE NDAO | 4.038.483.450 |
| 5. | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | 6.130.517.221 |
| 6. | KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | 5.084.278.938 |
| 7. | KABUPATEN BELU | 5.189.614.104 |
| 8. | KABUPATEN ALOR | 4.160.395.580 |
| 9. | KABUPATEN FLORES TIMUR | 4.540.245.528 |
| 10. | KABUPATEN LEMBATA | 3.915.786.366 |
| 11. | KABUPATEN SIKKA | 5.784.940.783 |
| 12. | KABUPATEN ENDE | 4.839.646.548 |
| 13. | KABUPATEN NGADA | 3.685.845.548 |
| 14. | KABUPATEN NAGEKEO | 4.019.152.481 |
| 15. | KABUPATEN MANGGARAI | 5.221.560.879 |
| 16. | KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | 4.233.119.640 |
| 17. | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | 5.082.502.562 |
| 18. | KABUPATEN SUMBA TIMUR | 4.220.967.735 |
| 19. | KABUPATEN SUMBA BARAT | 3.659.381.474 |
| 20. | KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA | 3.900.902.336 |
| 21. | KABUPATEN SUMBA TENGAH | 3.427.395.557 |
| 22. | KABUPATEN MALAKA | 4.538.732.026 |
| TOTAL | | 109.578.662.367 |

3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)

| NO | KAB/KOTA | PBB - KB |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. | KOTA KUPANG | 31.956.985.712 |
| 2. | KABUPATEN KUPANG | 9.007.925.395 |
| 3. | KABUPATEN SABU RAIJUA | 5.631.566.761 |
| 4. | KABUPATEN ROTE NDAO | 6.718.770.480 |
| 5. | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | 10.236.303.114 |
| 6. | KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | 8.937.438.664 |
| 7. | KABUPATEN BELU | 10.618.067.555 |
| 8. | KABUPATEN ALOR | 8.183.541.475 |
| 9. | KABUPATEN FLORES TIMUR | 8.966.961.132 |
| 10. | KABUPATEN LEMBATA | 6.635.893.791 |
| 11. | KABUPATEN SIKKA | 12.812.293.944 |
| 12. | KABUPATEN ENDE | 10.477.868.384 |
| 13. | KABUPATEN NGADA | 7.912.115.614 |
| 14. | KABUPATEN NAGEKEO | 7.899.316.697 |
| 15. | KABUPATEN MANGGARAI | 11.756.445.435 |
| 16. | KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | 7.556.876.200 |
| 17. | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | 11.201.654.908 |
| 18. | KABUPATEN SUMBA TIMUR | 12.096.271.762 |
| 19. | KABUPATEN SUMBA BARAT | 7.916.138.909 |
| 20. | KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA | 7.900.576.570 |
| 21. | KABUPATEN SUMBA TENGAH | 6.270.527.549 |
| 22. | KABUPATEN MALAKA | 7.167.863.926 |
| TOTAL | | 217.861.403.977 |

4

6

4. PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

| NO | KAB/KOTA | PAJAK AIR PERMUKAAN |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. | KOTA KUPANG | 7.882.606 |
| 2. | KABUPATEN KUPANG | 149.249.170 |
| 3. | KABUPATEN SABU RAIJUA | 4.560.286 |
| 4. | KABUPATEN ROTE NDAO | 14.199.003 |
| 5. | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | 22.311.816 |
| 6. | KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | 12.977.472 |
| 7. | KABUPATEN BELU | 16.442.730 |
| 8. | KABUPATEN ALOR | 11.283.057 |
| 9. | KABUPATEN FLORES TIMUR | 4.545.455 |
| 10. | KABUPATEN LEMBATA | 14.514.732 |
| 11. | KABUPATEN SIKKA | 17.126.749 |
| 12. | KABUPATEN ENDE | 32.222.530 |
| 13. | KABUPATEN NGADA | 49.923.394 |
| 14. | KABUPATEN NAGEKEO | 22.151.824 |
| 15. | KABUPATEN MANGGARAI | 4.545.455 |
| 16. | KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | 7.430.838 |
| 17. | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | 15.576.322 |
| 18. | KABUPATEN SUMBA TIMUR | 74.257.530 |
| 19. | KABUPATEN SUMBA BARAT | 4.545.455 |
| 20. | KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA | 5.162.669 |
| 21. | KABUPATEN SUMBA TENGAH | 4.545.455 |
| 22. | KABUPATEN MALAKA | 4.545.455 |
| TOTAL | | 500.000.000 |

5. PAJAK ROKOK (PR)

| NO | KAB/KOTA | PAJAK ROKOK |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. | KOTA KUPANG | 10.589.141.681 |
| 2. | KABUPATEN KUPANG | 9.119.536.333 |
| 3. | KABUPATEN SABU RAIJUA | 2.986.786.672 |
| 4. | KABUPATEN ROTE NDAO | 4.479.606.181 |
| 5. | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | 10.037.822.600 |
| 6. | KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | 5.960.444.304 |
| 7. | KABUPATEN BELU | 5.327.494.641 |
| 8. | KABUPATEN ALOR | 5.014.679.196 |
| 9. | KABUPATEN FLORES TIMUR | 5.988.840.379 |
| 10. | KABUPATEN LEMBATA | 3.846.713.845 |
| 11. | KABUPATEN SIKKA | 7.211.916.283 |
| 12. | KABUPATEN ENDE | 6.310.140.250 |
| 13. | KABUPATEN NGADA | 4.221.805.743 |
| 14. | KABUPATEN NAGEKEO | 3.875.453.884 |
| 15. | KABUPATEN MANGGARAI | 7.615.461.583 |
| 16. | KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | 6.601.305.121 |
| 17. | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | 6.421.221.263 |
| 18. | KABUPATEN SUMBA TIMUR | 6.059.887.894 |
| 19. | KABUPATEN SUMBA BARAT | 3.577.562.621 |
| 20. | KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA | 7.768.620.764 |
| 21. | KABUPATEN SUMBA TENGAH | 2.473.440.666 |
| 22. | KABUPATEN MALAKA | 4.784.797.107 |
| TOTAL | | 130.272.679.010 |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

24